



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001-2014)

Anies Purniati¹ Toni Heryana²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. *This study aims to determine whether there is a reciprocal or reciprocal relationship between General Allocation Fund Receipts, Local Income Receipts and Capital Expenditure Allocation of Provincial Government Year 2001-2014. This research is a research time series data and using descriptive method to test and provide a picture of the relationship these three variables. Based on the result of data analysis using VAR method with Granger Causality test at 5% significance level with the help of Eviews 9.5, showing the result that there is no reciprocal or reciprocal relationship between the three variables tested, either the relationship between DAU and Capital Expenditure, PAD with Capital Expenditure as well as the relationship between PAD and DAU*

Keywords: *General Allocation Funds, Local Original Income, and Capital Expenditures*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan timbal balik atau resiprokal antara Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Tahun 2001-2014. Penelitian ini merupakan penelitian data *time series* dan menggunakan metode deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran hubungan ketiga variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode VAR dengan pengujian *Granger Causality* pada tingkat signifikansi 5% dengan bantuan *Eviews 9.5*, menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal diantara ketiga variabel yang diuji, baik itu hubungan antara DAU dan Belanja Modal, PAD dengan Belanja Modal maupun hubungan antara PAD dan DAU.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

Corresponding Author. Email. aniespur94@gmail.com¹ toni.heryana@upi.edu²

How to Cite This Article. Purniati, A., & Heryana, T. (2016). Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001-2014). *Jurnal Akuntansi Riset.. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 8(1), 25-40. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/4018>

History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: June 2016
Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v8i1.4018
Copyright©2016. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

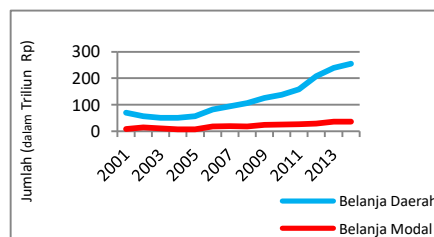
PENDAHULUAN

Tercatat sejak awal tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan asas pemerintahan desentralisasi. Dalam Desentralisasi ini, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Penerapan Desentralisasi oleh Pemerintah Pusat ini memiliki tujuan dan maksud tertentu. Maimuanah (2006) mengungkapkan bahwa “Penyerahan wewenang atau lebih dikenal dengan nama Desentralisasi ini mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah”.

Dalam konteks otonomi daerah, setiap tahun pemerintah daerah memiliki kewajiban

untuk melakukan sejumlah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan daerah dan masyarakatnya, dimana pengeluaran inilah yang dikenal sebagai belanja daerah. Belanja daerah ini digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung (Sasana, 2011). Pada umumnya, setiap tahun belanja daerah yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah adalah kelompok belanja tidak langsung. Dimana belanja ini bersifat jangka pendek dan jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Sedangkan alokasi untuk belanja lain, termasuk Belanja Modal masih dapat dikatakan rendah. Berikut merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dan belanja modal Pemerintah Provinsi pada tahun 2001-2014.

Gambar 1
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal
Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2001-2014



(Sumber : DJPK Kemenkeu dan BPS, Data diolah)

Grafik diatas menunjukkan bahwa meskipun besaran Belanja Modal setiap tahun, dalam rentang tahun 2001-2014 mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah secara keseluruhan, alokasi belanja untuk Belanja Modal masih dapat dikatakan minim. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Manager Hubungan KPPOD, Robert Endi Jaweng pada tahun 2012 silam dalam (www.kppod.org) yang menyatakan bahwa “berdasarkan catatan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan otonomi daerah), belanja modal di beberapa daerah sangat minim, hanya sekitar 1% - 5% dari APBD dan

pembangunan daerah harus didorong oleh belanja pemerintah di sektor produktif”. Hal ini mengindikasikan bahwa, besaran Belanja Modal yang selama ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum optimal.

Hingga saat ini, sebagian besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada Dana Perimbangan yang setiap tahun digulirkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai seluruh kegiatan Belanja Daerahnya. Mengingat jumlah Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi

Umum untuk beberapa daerah masih menjadi sumber utama dalam penerimaan Pemerintah Daerah dibanding sumber penerimaan lain. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya besaran

Dana Alokasi Umum yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setiap tahunnya, seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Alokasi DAU Pemerintah Daerah Tahun 2004-2013
(Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Jumlah DAU	Tahun	Jumlah DAU
2004	82.131	2009	186.414
2005	88.765	2010	203.572
2006	145.664	2011	225.534
2007	164.787	2012	273.814
2008	179.507	2013	311.139

(Sumber : www.Bappenas.go.id, Data diolah)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa setiap tahun jumlah Dana Alokasi Umum yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Provinsi selalu mengalami peningkatan. Namun sayangnya, kenaikan besaran DAU ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Mengingat sampai saat ini, “DAU lebih sering digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dibandingkan untuk membiayai Belanja Modal” (KPPOD, 2015). Selain DAU, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun ikut berkontribusi terhadap besaran Belanja Modal. Walaupun kontribusi PAD ini belum dapat dikatakan besar. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Soleh & Heru (2010, hlm. 78-79) yang menyebutkan bahwa “sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil”.

Sebelumnya, telah banyak peneliti yang mengangkat fenomena Alokasi Belanja Modal ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal

Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryana (2014) yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki hubungan terhadap Belanja Modal, bahkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 pun menunjukkan bahwa terdapat hubungan resiprokal atau timbal balik antara PAD, DAU dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktora & Winston (2013), yang menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan Belanja Modal dan DAU memiliki hubungan yang erat dengan Belanja Modal Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi tengah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Heryana tahun 2014 silam. Dimana perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dari objek yang diteliti. Jika sebelumnya Heryana (2014) melakukan penelitian untuk menguji *flypaper effect* Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Maka dalam penelitian ini, peneliti memilih objek Alokasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Deaerah dan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagai fokus penelitian. Selain itu subjek dan waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini berbeda. Jika sebelumnya Heryana (2014) menggunakan subjek penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2004-2013, namun dalam penelitian ini subjek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2001-2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah terdapat hubungan timbal balik antara Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Modal
2. Apakah terdapat hubungan timbal balik antara Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal
3. Apakah terdapat hubungan timbal balik antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN LITERATUR

Ahmad Yani (2002, hlm. 110) menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Djaenuri (2012, hlm. 104) mengelompokan Dana Alokasi Umum kedalam dua bentuk, yaitu Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. DAU bagi masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah di seluruh Indonesia. DAU baik untuk daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

Djaenuri (2012, hlm. 104),

$$DAU = \text{Jumlah Dana Alokasi untuk daerah} \times \frac{\text{Bobot daerah yang bersangkutan}}{\text{Jumlah bobot dari seluruh d}}$$

Menurut Ahmad Yani (2002, hlm. 111) Dana alokasi umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Provinsi yang bersangkutan. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan proporsi bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Provinsi diseluruh indonesia. Holtz-eaken et.al (1985) dalam Oktora dan Winston (2013) menyatakan bahwa “terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah”. Dimana Transfer dari pemerintah ini digulirkan secara rutin setiap tahunnya, dalam bentuk DAU, DAK ataupun DBH. Soleh dan Heru (2010, hlm. 78-79) pun menyebutkan bahwa “Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil”.

Djaenuri (2012, hlm. 88) menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan pasal 285, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mardiasmo (2002, hlm. 46) mengungkapkan bahwa “selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah”. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Furstenberg et al, 1998 ;

Doi, 1998 ; Aziz et al, 2000 dalam Maimunah (2006) menyebutkan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah, dimana hipotesis ini dikenal dengan nama *Tax Spend Hypothesis*. Pendapat ini kembali diperkuat oleh Soleh dan Heru (2010, hlm. 71) dalam bukunya yang menyatakan bahwa “pajak daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang terpenting”. Hal ini menunjukkan bahwa, pajak daerah berada diposisi teratas dalam sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbanyak. Dimana pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu sumber dana disamping DAU, yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah, termasuk belanja modal daerah.

Purnomo (2009, hlm. 45) mengungkapkan bahwa “belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Kurniawati (2010) menyebutkan bahwa Belanja modal terdiri atas dua jenis, yaitu Belanja publik dan Belanja aparatur.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa, Suandi (2014) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Belanja Modal Pemerintah Provinsi, antara lain PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Pegawai. Dimana dari kelima variabel tersebut DBH dan DAU memiliki hubungan positif dan signifikan. Sedangkan untuk PAD, DAK dan Belanja Pegawai memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. Hasil ini mendukung hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Harianto dan Priyo pada tahun 2007 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal masih kurang efektif.

Sehingga pembangunan di daerah masih belum merata. Situngkir dan Manurung (2009) pun menunjukkan hasil yang serupa dimana, PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Teori lain pun menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana PAD suatu daerah secara tidak langsung dapat memengaruhi besaran DAU yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sepandji (2000, hlm. 58), bahwa “daerah yang memiliki PAD yang rendah akan memiliki eligibitas untuk memperoleh alokasi umum yang lebih besar”. Disisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Priyo (2007) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pembangunan memiliki dampak positif terhadap penerimaan PAD suatu daerah. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Harianto dan Priyo (2007) pun menunjukkan bahwa “Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung)”. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Heryana (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara besaran PAD, DAU dan Belanja Modal dalam jangka panjang. Sehingga tidak hanya PAD dan DAU saja yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, namun sebaliknya belanja modal pun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi besaran PAD dan DAU.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini, antara lain:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan timbal balik dengan Belanja Modal.
- H2 : Dana Alokasi Umum memiliki hubungan timbal balik dengan Belanja Modal.

H3 : Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan timbal balik dengan Dana Alokasi Umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, dimana Saraswati dan Cahyono (2014) menyebutkan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan timbal balik yang dimiliki oleh ketiga variabel. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* yang terfokus pada besaran agregat PAD, DAU dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi untuk tahun 2001-2014. Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis VAR (*Vector Auto Regression*). Dimana dalam tahapan analisis VAR ini, terlebih dahulu peneliti melakukan Uji Stasioneritas, Penentuan lag Optimal dan Uji Kausalitas Granger. Model VAR yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$Y_t = \alpha$$

(Rosadi, 2012 : hlm. 212).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji stasioneritas yang ditunjukkan dalam lampiran tabel A diketahui bahwa variabel PAD dan DAU telah stasioner atau tidak memiliki *unit root* pada

kondisi level dengan tingkat kesalahan *alpha* 1%, 5% dan 10%. Sedangkan untuk variabel Belanja Modal baru menunjukkan keadaan stasioner pada kondisi *1st difference* dengan tingkat kesalahan *alpha* 1%, 5% dan 10%. Saat variabel DAU dan PAD didiferensiasikan pada orde pertama, kedua variabel ini menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Mengingat dalam analisis VAR ini seluruh variabel harus stasioner pada tingkat yang sama, maka ketiga variabel ini diturunkan kembali hingga *second difference*. Di tingkat ini ketiga variabel menunjukkan hasil yang sama, yaitu Stasioner pada turunan dua. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan model VAR, lebih tepatnya *Unrestricted VAR*. Tahapan selanjutnya adalah penentuan *lag optimal*, dimana hasil output (pada tabel B) menunjukkan bahwa *lag optimal* yang tepat untuk model VAR ini adalah pada kondisi lag 1. Tahapan selanjutnya adalah uji *Granger Causality*, uji ini bertujuan untuk menguji hubungan jangka panjang dan timbal balik antara variabel yang diteliti. Secara ikhtisar hasil pengujian Kausalitas Granger untuk penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Ikhtisar Hasil Pengujian *Kausalitas Granger*

	Hasil Pengujian	Interpretasi
DAU ↔ BM	Menerima Ho	DAU tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap belanja modal.
PAD ↔ BM	Menerima Ho	PAD tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap belanja modal.
DAU ↔ PAD	Menerima Ho	DAU tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap PAD.

(Sumber : Hasil Pengolahan VAR dengan E-Views versi 9.5, 2016)

Berdasarkan ikhtisar hasil pengujian Kausalitas Granger pada Tabel C, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik

atau resiprokal antara variabel belanja modal dan variabel DAU. Hal ini terjadi karena hanya DAU yang memiliki pengaruh

terhadap belanja modal dan tidak untuk sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa hanya besaran DAU pada masa lalu (DAUt-1) yang menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan belanja modal dimasa yang akan datang (BMt+1). Sedangkan besaran belanja modal pada tahun lalu (BMt-1) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam menentukan besaran DAU dimasa depan.

Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heryana (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal antara variabel DAU dan BM. Namun, hubungan searah DAU terhadap Belanja modal yang ditunjukkan oleh pengujian ini, mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikin (2007), Maharani (2010), Edy, Cherrya (2014) yang menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa besaran Alokasi Belanja Modal yang selama ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Mengingat hingga saat ini penerimaan DAU bagi pemerintah provinsi menempati posisi kedua terbesar dalam hal penerimaan, setelah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan Dana Bagi Hasil.

Sementara itu, hubungan antara PAD dan Belanja Modal, berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal antara variabel PAD dan Belanja Modal. Hal ini diambil setelah melihat hasil pengujian yang menunjukkan hasil bahwa hanya PAD yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal dan tidak untuk sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran PAD tahun lalu atau (PADt-1) merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi untuk menentukan besaran belanja modal di tahun sekarang namun tidak untuk sebaliknya.

Hasil pengujian ini kembali bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Heryana (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan resiprokal antara variabel PAD dan Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Dimana dalam penelitiannya beliau mengungkapkan bahwa “besarnya PAD saat ini akan menjadi penentu belanja modal di masa mendatang, dan sebaliknya belanja modal yang diperlukan menjadi penentu target PAD yang harus diperoleh oleh Pemerintah”. Namun dalam penelitian ini didapati hanya PAD yang memiliki hubungan mempengaruhi terhadap belanja modal dan tidak untuk sebaliknya. Hasil ini kembali bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Priyo (2007) yang menunjukkan bahwa “belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan asli daerah”. Karena dalam praktiknya, belanja modal ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan pemasukan bagi pemerintah yang bersangkutan, yang nantinya akan masuk kepada kas pemasukan daerah melalui pos Pendapatan Asli Daerah. Namun, mengingat belanja modal adalah belanja yang bersifat jangka panjang serta timbal balik yang akan diterima oleh daerah pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, dalam hal ini realisasi belanja modal pada tahun sebelumnya atau BM(t-1) belum mampu memengaruhi besaran PAD pemerintah tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil pengujian yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikin (2007), Tuasikal (2008) dan Mawarni, dkk. (2013) silam yang menunjukkan adanya pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal. Mengingat untuk pemerintah daerah tingkat provinsi ini, besaran PAD yang dihasilkan setiap tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran DAU yang diterima dari pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran belanja modal selama ini lebih banyak dibiayai oleh penerimaan asli daerah

hal ini tercermin pula dari hasil perhitungan nilai statistik F (dalam lampiran tabel D) yang dimana nilai F untuk PAD lebih besar dari nilai F untuk DAU.

Hubungan antara PAD dan DAU sendiri, berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal antara DAU dan PAD. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian *Granger Causality* yang memperlihatkan bahwa hanya PAD yang memengaruhi besaran DAU dan tidak untuk sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa besaran PAD pada tahun lalu (PAD_{t-1}) merupakan faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menentukan besaran DAU tahun berikutnya (DAU_{t+1}), namun besaran DAU pada tahun lalu (DAU_{t-1}) tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD tahun berikutnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryana (2014) yang menunjukkan hasil yang serupa bahwa PAD dan DAU tidak memiliki hubungan resiprokal. Selain itu hasil penelitian ini juga semakin memperkuat teori yang diungkapkan oleh Sepandji (2000, hlm. 58) yang menyatakan bahwa “daerah yang memiliki PAD yang rendah akan memiliki elegibitas untuk memperoleh Dana Alokasi Umum yang lebih besar”. Bagaimanapun Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator pemerintah dalam memberikan besaran DAU kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah, maka akan semakin memperkecil DAU yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah tersebut. Hal ini dilakukan karena, Pemerintah Pusat beranggapan bahwa daerah yang telah mampu menghasilkan PAD sendiri dengan jumlah yang besar adalah salah satu ciri pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi. Sehingga besaran Dana Alokasi Umum yang diberikan pun menjadi lebih kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum, penerimaan Pendapatan Asli daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia, maka peneliti mencoba untuk menarik simpulan dari penelitian ini sebagai berikut,

1. Tidak terdapat hubungan timbal balik antara Penerimaan Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Modal.
2. Tidak terdapat hubungan timbal balik antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal.
3. Tidak terdapat hubungan timbal balik antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Dana Alokasi Umum.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain :

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat lebih optimal dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat daerah, termasuk sektor pariwisata daerah. Sehingga nantinya kedua upaya ini akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PAD melalui pos retribusi daerah. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah pun perlu dioptimalkan, sehingga penerimaan PAD dari pos pajak daerah dapat lebih meningkat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data time series triwulan. Selain itu, direkomendasikan pula untuk melakukan pengujian lag pada masing-masing variabel. Sehingga observasi yang dilakukan dapat lebih luas dan dapat menginterpretasikan hasil analisis VAR dengan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Purnomo, B. S. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan EViews*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Sepandji, K. T. (2000). *Manajemen Pemerintahan Daerah – Era Reformasi menuju Pembangunan Otonomi Daerah*. Bandung : Universal Offset.
- Soleh, C. & Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Darmayasa I.N., & I.K. Suandi. (2014). Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi. *Seminar Nasional Akuntansi 12, Mataran, Lombok*.
- Enders, W. (2004). *Applied Economics Time Series*. John Willey and Sons, Inc., New York.
- Hariato, A., Priyo H.A. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Heryana, T. (2014). Analisis Flypaper Effect Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia Berbasis Vector Autoregressive (VAR). *Jurnal Wacana Kinerja Volume 17 (2), November 2014 :1-19*.
- Kurniawati, F.R. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia*. [Tesis]. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Maharani, M. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang*.
- Mawarni., Darwanis., & Syukriy A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Meianto, E., Betri., Cherrya. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. STIE Multi Data, Palembang.
- Oktora, F.E., & Winston P. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Akuntansi Volume 2 (1), Juni 2013*.
- Saraswati dan Cahyono. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita di Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1)*.

- Situngkir, A., & John S.M. . (2009). Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi, Volume 4 (2) Desember 2009:93-103*.
- Solikin, I. (2007). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Volume 1(2), Juli 2008*.
- Bappenas. (2014). *Belanja Pemerintah*. [Online]. Diakses dari <http://bappenas.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik. (2006). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2003-2006*. [Online]. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- _____. (2009). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2006-2009*. [Online]. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- _____. (2011). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2008-2011*. [Online]. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- _____. (2014). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2011-2014*. [Online]. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- _____. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2012-2015*. [Online]. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan. (2014). *Data Keuangan Daerah*. [Online]. Diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>.
- KPPOD. (2012). *149 Daerah Boros Belanja Pegawai*. [Online]. Diakses dari <http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/149-daerah-boros-belanja-pegawai/>.
- KPPOD. (2015). *Laporan Penelitian, Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD*. [Online]. Diakses dari <http://www.kppod.org/>.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL A
 Hasil Pengujian Unit Root Test Variabel Penelitian

No	Variabel	ADF Test					
		Level	Keterangan	1 st Dif.	Keterangan	2 nd Dif.	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah	11.0855	Stasioner	0.715227	Tidak Stasioner	-4.603538	Stasioner
2.	Dana Alokasi Umum	5.1025	Stasioner	-2.258636	Tidak Stasioner	-3.936959	Stasioner
3.	Belanja Modal	2.6212	Tidak Stasioner	3.060908	Stasioner	-3.755702	Stasioner

Signifikan pada tingkat kesalahan 1%
 (Sumber : Hasil estimasi menggunakan EViews 9.5, 2016)

TABEL B
Penentuan Lag Optimal dengan Model VAR

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1102.008	NA	1.93e+76	184.1681	184.2893	184.1232
1	-1064.734	49.69958*	1.88e+74*	179.4556*	179.9405*	179.2761*
2	-1056.798	6.613230	3.43e+74	179.6330	180.4816	179.3188

(Sumber : Hasil Penelitian, EViews 9.5, 2016)

TABEL C
Output Pengujian Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DAU does not Granger Cause BM	13	9.64202	0.0112
BM does not Granger Cause DAU		1.33255	0.2752
PAD does not Granger Cause BM	13	6.08075	0.0333
BM does not Granger Cause PAD		1.84437	0.2043
PAD does not Granger Cause DAU	13	6.72952	0.0268
DAU does not Granger Cause PAD		0.02159	0.8861

(Sumber : Hasil Penelitian Granger Causality, EViews 9.5, 2016)

TABEL D
 Output Estimasi VAR BM, PAD dan DAU
 Vector Autoregression Estimates
 Date: 06/04/16 Time: 22:53
 Sample (adjusted): 2004 2014
 Included observations: 11 after adjustments
 Standard errors in () & t-statistics in []

	DDBM	DDDAU	DDPAD
DDBM(-1)	-0.016369 (0.43620) [-0.03753]	-0.121567 (0.16264) [-0.74746]	0.765950 (0.40701) [1.88191]
DDDAU(-1)	0.952033 (0.88772) [1.07245]	0.631247 (0.33100) [1.90712]	-1.172129 (0.82831) [-1.41509]
DDPAD(-1)	0.081546 (0.19317) [0.42214]	0.192699 (0.07203) [2.67539]	1.271591 (0.18025) [7.05479]
C	3.17E+12 (3.3E+12) [0.95818]	2.26E+12 (1.2E+12) [1.82762]	7.16E+11 (3.1E+12) [0.23168]
R-squared	0.839941	0.971100	0.985120
Adj. R-squared	0.771345	0.958714	0.978743
Sum sq. resids	9.09E+25	1.26E+25	7.91E+25
S.E. equation	3.60E+12	1.34E+12	3.36E+12
F-statistic	12.24464	78.40507	154.4811
Log likelihood	-331.1633	-320.3113	-330.4014
Akaike AIC	60.93879	58.96569	60.80025
Schwarz SC	61.08348	59.11038	60.94494
Mean dependent	1.86E+13	1.54E+13	4.14E+13
S.D. dependent	7.54E+12	6.61E+12	2.31E+13
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.81E+74	
Determinant resid covariance		4.65E+73	
Log likelihood		-979.7694	
Akaike information criterion		180.3217	
Schwarz criterion		180.7558	

(Sumber : Hasil Estimasi VAR, EViews 9.5, 2016)

TABEL E
Output VAR Model *Substituted Coefficient*

<p>Estimation Proc: =====</p> <p>LS 1 1 DDBM DDDAU DDPAD @ C VAR Model: =====</p> <p>DDBM = C(1,1)*DDBM(-1) + C(1,2)*DDDAU(-1) + C(1,3)*DDPAD(-1) + C(1,4) DDDAU = C(2,1)*DDBM(-1) + C(2,2)*DDDAU(-1) + C(2,3)*DDPAD(-1) + C(2,4) DDPAD = C(3,1)*DDBM(-1) + C(3,2)*DDDAU(-1) + C(3,3)*DDPAD(-1) + C(3,4)</p> <p>VAR Model - Substituted Coefficients: =====</p> <p>DDBM = - 0.0163687768308*DDBM(-1) + 0.952032609153*DDDAU(-1) + 0.0815455934128*DDPAD(-1) + 3.17162273077e+12 DDDAU = - 0.12156723184*DDBM(-1) + 0.631247432184*DDDAU(-1) + 0.192699464207*DDPAD(-1) + 2.25562372579e+12 DDPAD = 0.765950198964*DDBM(-1) - 1.17212946435*DDDAU(-1) + 1.27159131261*DDPAD(-1) + 715556465937</p>

(Sumber : Hasil Estimasi VAR, EViews 9.5, 2016)

